

KPK Dukung Penuntasan Masalah Hutan Adat Papua

TEMPO/MUHAMMAD HIDAYAT



Diskusi Investigasi Bersama Tempo di Hotel Morrisey, Jakarta, kemarin.

JAKARTA—Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode Muhammad Syarif menyatakan lembaganya siap memfasilitasi penyelesaian masalah izin pemanfaatan kayu bagi masyarakat hutan adat di Papua yang hingga kini terganjal tumpang-tindih regulasi pemerintah pusat dan daerah. Namun, dia meminta tak ada pihak yang serta-merta berbicara atas nama masyarakat adat. “Kalau mau, kita kerjakan bersama-sama,” kata Laode dalam diskusi “Hutan Papua dan Sengkarut Sistem Legalitas Kayu” di Hotel Morrisey, Jakarta, kemarin.

Diskusi tersebut digelar Tempo Media Group bersama sejumlah lembaga pemerhati lingkungan, seperti Auriga Nusantara dan Eyes on the Forest. Desember lalu, laporan investigasi *Tempo* mengungkap maraknya praktik pembalakan liar yang justru dilakoni oleh industri kayu pemegang sertifikat legalitas kayu (SLK) di Papua dan Papua Barat. Sebulan terakhir, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pun menyelidiki kasus serupa dengan menyetop pengiriman 384 kontainer yang diduga berisi kayu ilegal asal Papua.

Di sisi lain, persoalan lama mencuat. Nasib izin pemanfaatan hasil hutan kayu bagi masyarakat adat yang pernah dikeluarkan Pemerintah Provinsi Papua sewindu silam tak diakui lantaran tidak dikenal dalam nomenklatur KLHK. Peneliti sekaligus juru komunikasi lembaga kajian dan advokasi lingkungan Auriga Nusantara, Syahrul Fitra, menilai masalah ini mendesak diselesaikan. “Tumpang-tindih regulasi ini kerap jadi ladang lahirnya pembalakan liar oleh industri yang mengatasnamakan masyarakat,” kata Syahrul.